

DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL
i**

HALAMAN PENGESAHAN ii

**LEMBAR PENGESAHAN
iii**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
iv**

**MOTTO
v**

KATA PENGANTAR vi

**ABSTRAK
ix**

DAFTAR ISI xi

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
xiv**

DAFTAR SINGKATAN xvi

**DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL
xvii**

**BAB I PENDAHULUAN
1**

**1.1 Latar Belakang
1**

1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Metode	14
1.5.1 Tipe Penelitian	14
1.5.2 Pendekatan Penelitian	15
1.5.3 Bahan Hukum	17
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.5.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	20
BAB II URGENSI KETENTUAN <i>CARRY-OVER</i> DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA	21
2.1 Efektivitas dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut Teori <i>Good Governance</i>	24

2.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Aspek Keuangan Negara	
35	
2.3 Undang-Undang Sebagai Jaminan Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat	
43	
BAB III GAGASAN MEKANISME <i>CARRY-OVER</i> PADA PERGANTIAN PERIODE JABATAN DPR	
51	
3.1 Batasan	
59	
3.1.1 Aspirasi (<i>Matter</i>)	
60	
3.1.2 Masa Transisi	
64	
3.1.3 Legitimasi	
67	
3.2 Mekanisme <i>Carry-Over</i> dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Eropa	70
3.2.1 Mekanisme <i>Carry-Over</i> dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Belanda	71

3.2.2 Mekanisme <i>Carry-Over</i> dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Inggris	73
3.3 Gagasan Pelaksanaan Mekanisme <i>Carry-Over</i> di Indonesia	78
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	82
DAFTAR BACAAN	xvii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752);

Universal Declaration of Human Rights;

Standing Order No. 80A. Carry-over of bills;

Standing Order No. 80B. Carry-over;

Tweede Kamer Der Staten-Generaal: Rules of Procedure.

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
AUPK	: Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EP	: <i>European Parliament</i>
Peraturan DPR 1/2014	: Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Peraturan DPR 2/2016	: Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU 15/2019	: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU P3	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

DIAGRAM

Diagram 1.1. Target dan Capaian RUU oleh DPR Periode 2009-2014/2014-2019	7
Diagram 2.1. Letak pelaksanaan <i>carry-over</i> dalam proses pembentukan undang-undang	24
Diagram 2.2. Tahapan efektivitas dalam pembentukan undang-undang	31
Diagram 2.3. Piramida hierarki pembentukan undang-undang bagi legislator	33

TABEL

Tabel 3.2.2.1 Karakteristik <i>carry-over</i> di Belanda dan Inggris	71
--	----